



PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN KABUPATEN BANGGAI

Muhlin¹

¹Ilmu Administrasi Negara Universitas Tompotika Luwuk,

Email: muhlinfisip.untika@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Banggai memiliki lanskap wisata bahari dan darat yang kuat, namun pertumbuhan kunjungan belum selalu diimbangi tata kelola, pemerataan manfaat, dan pengendalian dampak lingkungan. Penelitian ini bertujuan (1) memotret kesiapan pengembangan pariwisata berkelanjutan Kabupaten Banggai dan (2) merumuskan strategi prioritas yang operasional untuk memperkuat keberlanjutan destinasi. Metode yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur, observasi lapangan pada beberapa titik daya tarik wisata, serta telaah dokumen kebijakan dan data sektoral. Analisis dilakukan melalui pengodean tematik, triangulasi sumber, dan pemetaan isu–aksi berdasarkan pilar pengelolaan, sosial-ekonomi, budaya, dan lingkungan. Hasil menunjukkan tantangan utama berada pada kelembagaan lintas sektor, pengelolaan sampah dan sanitasi, serta belum terukurnya daya dukung. Strategi prioritas diarahkan pada penguatan organisasi pengelola destinasi, pemberdayaan ekonomi lokal berbasis komunitas, dan penerapan praktik “zero waste” bertahap.

Kata Kunci: pariwisata berkelanjutan; tata kelola destinasi; pemberdayaan masyarakat; daya dukung; Banggai

Abstract

Banggai Regency has strong coastal and inland attractions, yet visitor growth is not consistently matched by governance capacity, equitable benefit sharing, and environmental impact control. This study aims to (1) assess Banggai's readiness for sustainable tourism development and (2) formulate practical priority strategies to strengthen destination sustainability. A qualitative case study was applied using semi-structured interviews, field observations at selected attractions, and a review of policy documents and sectoral data. The analysis employed thematic coding, source triangulation, and an issue-to-action mapping based on four pillars: management, socio-economic, cultural, and environmental sustainability. The findings indicate that key constraints lie in cross-sector institutional arrangements, waste and sanitation management, and the absence of measurable carrying capacity. Priority strategies focus on strengthening destination management organizations, expanding community-

based local economic benefits, and implementing phased zero-waste practices supported by monitoring indicators.

Keywords : Sustainable tourism; destination management; community-based tourism; carrying capacity; Banggai

Pendahuluan

Pariwisata kerap diposisikan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi daerah karena membuka peluang kerja, menggerakkan UMKM, dan mendorong perbaikan infrastruktur. Namun, pengalaman banyak destinasi menunjukkan bahwa peningkatan arus wisatawan dapat memunculkan biaya sosial dan ekologis bila tidak dikendalikan sejak awal. Karena itu, pariwisata berkelanjutan menuntut keseimbangan antara manfaat ekonomi, keadilan sosial, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan—bukan sekadar “ramai kunjungan”, tetapi “bermutu pengelolaan”. Dalam diskursus global, pariwisata berkelanjutan didefinisikan sebagai pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini serta masa depan, sekaligus memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan komunitas tuan rumah (United Nations Department of Economic and Social Affairs, n.d.).

Di Indonesia, arah kebijakan destinasi pariwisata berkelanjutan dipertegas melalui pedoman yang menempatkan empat ruang lingkup utama: pengelolaan berkelanjutan, keberlanjutan sosial-ekonomi, keberlanjutan budaya, dan keberlanjutan lingkungan (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2021). Keempat pilar tersebut penting sebagai “kompas” agar pembangunan destinasi tidak terjebak pada orientasi jangka pendek, misalnya pembangunan fisik tanpa rencana pengoperasian, promosi tanpa pengaturan daya dukung, atau event tanpa mitigasi sampah.

Kabupaten Banggai memiliki ragam daya tarik yang potensial: wisata air terjun dan agro, kawasan pesisir seperti pulau dua dan pulau tinalapu, serta ruang-ruang rekreasi di sekitar pusat kota. Salah satu contoh daya tarik yang dikenal masyarakat adalah Air Terjun Salodik di sekitar Luwuk yang relatif mudah dijangkau dari kota (Pemerintah Kabupaten Banggai, n.d.; Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, 2021). Potensi sejenis lazim menjadi pemicu tumbuhnya pelaku usaha wisata, dari pemandu lokal, homestay, hingga kuliner. Namun, pada saat yang sama, destinasi bertipe alam sangat peka terhadap beban kunjungan, perubahan perilaku wisatawan, dan lemahnya pengelolaan fasilitas dasar (sampah, toilet, air bersih, dan keselamatan).

Pada level praktik, Kabupaten Banggai menghadapi tantangan klasik destinasi berkembang: koordinasi lintas perangkat daerah yang belum solid, mekanisme pembiayaan pengelolaan destinasi yang terbatas, serta standar layanan yang bervariasi antar lokasi. Tantangan lain yang terasa di lapangan adalah pengelolaan sampah yang belum konsisten pada titik-titik keramaian, dan belum adanya pengaturan jumlah pengunjung berbasis daya dukung (*carrying capacity*). Padahal, studi indikator keberlanjutan menegaskan bahwa dimensi tata kelola seperti kelembagaan, pengukuran indikator, dan keterlibatan pemangku kepentingan sering kali menjadi titik lemah di banyak destinasi, termasuk di negara Global South (Rasoolimanesh et al., 2020).

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana tingkat kesiapan pengembangan

pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Banggai ditinjau dari pilar pengelolaan, sosial-ekonomi, budaya, dan lingkungan, serta strategi prioritas apa yang paling relevan untuk diterapkan dalam konteks kapasitas daerah dan karakter destinasi?

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi isu-isu kunci keberlanjutan pariwisata Kabupaten Banggai pada empat pilar dan (2) menyusun strategi prioritas yang dapat dijalankan bertahap oleh pemerintah daerah bersama pelaku usaha dan komunitas. Manfaat penelitian diharapkan memberi rujukan praktis bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana aksi pariwisata berkelanjutan, sekaligus memberi masukan bagi pokdarwis dan pelaku usaha terkait praktik operasional yang lebih ramah lingkungan dan lebih adil bagi ekonomi lokal.

Kerangka pikir penelitian menggunakan tiga landasan utama. Pertama, pendekatan indikator keberlanjutan sebagai alat bantu perencanaan dan monitoring, terutama agar pengambilan keputusan tidak hanya berbasis intuisi, tetapi juga bukti (Rasoolimanesh et al., 2020). Kedua, pendekatan *community-based tourism* (CBT) sebagai model untuk memperkuat peran komunitas, pemerataan manfaat, dan otentisitas pengalaman wisata (Abreu et al., 2024; Risfandini, 2024). Ketiga, pendekatan pengelolaan dampak lingkungan berbasis pengurangan sampah dan perubahan perilaku (*zero waste*) sebagai respons operasional yang dapat diterapkan di destinasi kecil-menengah (Alim et al., 2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada konteks Kabupaten Banggai. Pilihan desain ini digunakan untuk menangkap dinamika pengelolaan destinasi yang melibatkan banyak aktor (pemerintah, komunitas, dan pelaku usaha) serta beragam lokasi daya tarik wisata yang karakteristiknya berbeda.

1. Sifat dan Lokasi Penelitian

Penelitian bersifat eksploratif–diagnostik: memotret kondisi aktual, mengidentifikasi akar masalah, lalu menyusun prioritas strategi. Lokasi penelitian mencakup beberapa titik daya tarik wisata yang mewakili variasi karakter destinasi (alam darat dan pesisir) di Kabupaten Banggai, dengan mempertimbangkan aksesibilitas, intensitas kunjungan, dan keterlibatan komunitas lokal.

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari: 1. Data primer, diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan informan kunci: unsur perangkat daerah yang menangani pariwisata dan lingkungan, pengelola/pokdarwis, pelaku usaha (jasa wisata, kuliner, homestay), serta tokoh masyarakat di sekitar destinasi. Wawancara difokuskan pada praktik pengelolaan, pola pembagian manfaat, isu budaya-lokal, dan pengendalian dampak lingkungan. 2. Data sekunder, berasal dari dokumen kebijakan, pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2021), profil destinasi dari sumber resmi, serta publikasi penelitian relevan (Rasoolimanesh et al., 2020; Ismail & Widhi, 2022; Zakaria, 2024).

3. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui: - Observasi lapangan pada fasilitas dasar destinasi (kebersihan, toilet, titik sampah, papan informasi, alur kunjungan, dan aspek keselamatan sederhana). - Wawancara semi terstruktur untuk menggali persepsi aktor tentang problem utama dan peluang perbaikan. Studi dokumentasi untuk membaca keselarasan kebijakan, rencana program, dan praktik di lapangan.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dalam tiga tahap: 1. Pengodean tematik untuk mengelompokkan temuan sesuai empat pilar keberlanjutan (pengelolaan, sosial-ekonomi, budaya, lingkungan). 2. Triangulasi sumber (membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumen) agar temuan tidak bergantung pada satu narasi. 3. Pemetaan isu—aksi prioritas, yaitu menerjemahkan temuan menjadi rekomendasi program yang spesifik, terukur, dan realistis. Dalam tahap ini, konsep daya dukung sosial digunakan sebagai pertimbangan pengaturan kenyamanan warga dan wisatawan, bukan hanya kapasitas fisik (Ismail & Widhi, 2022).

Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Potensi dan Arah Pengembangan

Temuan lapangan menunjukkan bahwa daya tarik wisata Kabupaten Banggai bertumpu pada kekuatan alam (air terjun, pesisir, pulau kecil) serta kedekatan akses dari pusat aktivitas ekonomi. Karakter ini memberi peluang pengembangan wisata minat khusus (rekreasi alam, edukasi lingkungan, fotografi, dan wisata keluarga). Pada beberapa lokasi, pengunjung datang dengan pola “kunjungan singkat” (one day trip), sehingga belanja wisata cenderung terkonsentrasi pada parkir, makanan ringan, dan biaya masuk. Kondisi ini menandakan bahwa nilai ekonomi wisata masih dapat ditingkatkan melalui diversifikasi produk (pemandu, paket wisata, homestay, produk lokal) tanpa harus menaikkan volume kunjungan secara agresif.

Namun, peningkatan nilai ekonomi tidak bisa dilepaskan dari kualitas pengelolaan. Dalam banyak studi, destinasi sering gagal menjaga keberlanjutan karena tidak memiliki indikator yang dipantau secara rutin, sehingga kebijakan menjadi reaktif—baru bertindak setelah konflik muncul, sampah menumpuk, atau keluhan wisatawan meningkat (Rasoolimanesh et al., 2020). Kerangka pedoman nasional juga menegaskan bahwa pengelolaan berkelanjutan harus berjalan bersamaan dengan perlindungan lingkungan dan penguatan manfaat sosial-ekonomi (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2021).

B. Temuan Utama Berdasarkan Empat Pilar Keberlanjutan

1) Pilar Pengelolaan Berkelanjutan (Governance)

Temuan yang paling menonjol adalah belum konsistennya mekanisme koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan destinasi. Pengelolaan destinasi di lapangan sering ditopang oleh inisiatif komunitas atau pengelola setempat, sementara dukungan teknis dan regulasi dari pemerintah daerah belum selalu hadir dalam bentuk standar operasional yang seragam. Akibatnya, kualitas layanan antar destinasi bervariasi. Selain itu, data dan indikator kinerja destinasi belum tertata sebagai sistem monitoring. Padahal, indikator berfungsi untuk mendeteksi risiko sejak awal: misalnya perubahan kualitas lingkungan, kepuasan warga, keterisian fasilitas, hingga kebocoran ekonomi. Rasoolimanesh et al. (2020) menekankan bahwa dimensi tata kelola kerap terabaikan dalam indikator keberlanjutan, sehingga pengambilan keputusan kehilangan instrumen pengendali.

Implikasinya, strategi pembangunan sering fokus pada kegiatan yang mudah terlihat (event, promosi, pembangunan sarana tertentu), tetapi kurang memberi ruang pada pembiayaan operasional pengelolaan (kebersihan, pemandu, pemeliharaan jalur, keamanan) yang justru menentukan pengalaman wisata.

2) Pilar Keberlanjutan Sosial dan Ekonomi

Dari sisi sosial-ekonomi, temuan menunjukkan adanya peluang besar untuk memperkuat ekonomi lokal, tetapi manfaat belum merata. Usaha kecil yang muncul di sekitar destinasi seperti kuliner, parkir, jasa foto, dan penyewaan alat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi warga. Namun, beberapa lokasi masih mengandalkan aktivitas ekonomi yang musiman dan belum memiliki skema penguatan kapasitas (pelatihan layanan, pemasaran, pencatatan keuangan sederhana, serta standar kebersihan produk).

Model community-based tourism (CBT) relevan untuk menjawab persoalan ini karena menempatkan komunitas bukan hanya sebagai “penerima dampak”, tetapi sebagai pelaku utama yang mengatur pengalaman wisata, pembagian manfaat, dan perlindungan aset lokal (Abreu et al., 2024). Dalam konteks Indonesia, penguatan CBT juga dipandang sebagai jalur untuk mendorong pemberdayaan lokal, ekonomi hijau, serta tata kelola yang lebih inklusif (Risfandini, 2024). Dengan demikian, fokus pengembangan bukan menaikkan jumlah wisatawan sebanyak-banyaknya, melainkan meningkatkan kualitas belanja wisata melalui produk yang dikelola warga secara profesional.

3) Pilar Keberlanjutan Budaya

Pada pilar budaya, potensi Kabupaten Banggai berada pada identitas lokal, nilai-nilai komunal, serta ruang-ruang sosial yang dapat menjadi narasi wisata. Namun, temuan menunjukkan bahwa interpretasi budaya (cerita, penjelasan, panduan etika, dan pengalaman) belum dikelola secara sistematis. Di beberapa destinasi alam, wisata berjalan tanpa pengantar mengenai norma lokal, batas area sakral, atau praktik yang sebaiknya dihindari. Akibatnya, potensi budaya hanya menjadi “latar”, belum menjadi bagian pengalaman yang memberi nilai tambah.

Padahal, pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan menempatkan budaya sebagai pilar tersendiri artinya, budaya bukan pelengkap, tetapi faktor yang harus dikelola agar tidak tergerus dan agar manfaatnya kembali ke komunitas (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2021). Penguatan interpretasi budaya dapat dilakukan melalui pelatihan pemandu lokal, penyusunan kode etik pengunjung, dan dukungan event yang terkurasi (bukan sekadar keramaian, tetapi memperkuat identitas).

4) Pilar Keberlanjutan Lingkungan

Isu lingkungan muncul sebagai tantangan paling nyata. Temuan lapangan menunjukkan bahwa sampah dan sanitasi masih menjadi titik lemah pada lokasi yang ramai, terutama pada akhir pekan atau musim liburan. Pengelolaan sampah cenderung berhenti pada penyediaan tempat sampah, tanpa sistem pemilahan, pengangkutan rutin, dan pengurangan sumber sampah (botol plastik sekali pakai, kemasan makanan).

Pendekatan “zero waste” dapat menjadi jalan operasional yang masuk akal, terutama untuk destinasi skala kecil-menengah. Studi pada destinasi kecil di Indonesia menunjukkan bahwa program zero waste perlu ditopang oleh pelatihan staf/pengelola, edukasi pengunjung, kebijakan internal, serta kemitraan yang lebih luas agar praktiknya konsisten (Alim et al., 2024). Prinsip ini dapat diterapkan di Banggai dengan langkah bertahap: mulai dari pemilahan sederhana, sistem deposit/return botol, titik isi ulang air minum, hingga kolaborasi bank sampah.

Selain sampah, tantangan lain adalah belum diterapkannya daya dukung (carrying capacity) sebagai dasar pengaturan jumlah kunjungan, parkir, dan alur wisata. Studi daya dukung sosial menegaskan pentingnya mengukur batas kenyamanan warga

dan wisatawan agar destinasi tidak mengalami penurunan kualitas pengalaman maupun munculnya resistensi komunitas (Ismail & Widhi, 2022). Tanpa pengaturan daya dukung, destinasi alam rentan mengalami kepadatan, kerusakan jalur, dan konflik ruang. Untuk destinasi pesisir dan pulau kecil, pengelolaan lingkungan juga terkait dengan perlindungan ekosistem laut, terutama bila dikembangkan untuk snorkeling/diving. Literatur menunjukkan bahwa integrasi kawasan konservasi, perikanan, dan pariwisata berbasis alam dapat berjalan seiring jika desain kebijakan dan pengawasan dilakukan secara terpadu (Tranter et al., 2022). Temuan ini relevan untuk Banggai yang memiliki potensi bahari, karena keberlanjutan wisata bahari sangat bergantung pada kesehatan terumbu karang, kualitas air, dan perilaku wisatawan.

C. Strategi Prioritas Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Kabupaten Banggai

Berdasarkan temuan empat pilar, strategi prioritas disusun dengan prinsip: (1) dapat dijalankan bertahap, (2) menutup “bottleneck” paling kritis, dan (3) memberi dampak ganda (ekonomi–sosial–lingkungan).

Tabel 1. Pemetaan Isu–Aksi Prioritas Pariwisata Berkelanjutan Kabupaten Banggai

Pilar	Isu Kunci	Aksi Prioritas	Output yang Diharapkan
Pengelolaan	Koordinasi lintas sektor belum solid; monitoring indikator lemah	Membentuk forum/organisasi pengelola destinasi (DMO daerah) dan menetapkan indikator minimum yang dipantau triwulanan	SOP lintas OPD; dashboard indikator; kalender pemeliharaan destinasi
Sosial–Ekonomi	Manfaat ekonomi belum merata; kapasitas usaha warga bervariasi	Program penguatan CBT: pelatihan layanan, paket wisata berbasis komunitas, skema bagi hasil transparan	Paket wisata lokal; standar layanan; peningkatan belanja wisata per kunjungan
Budaya	Interpretasi budaya dan etika kunjungan belum tertata	Pelatihan pemandu lokal; penyusunan kode etik pengunjung; kurasi event berbasis identitas	Narasi destinasi; media interpretasi; event berkualitas dan terukur
Lingkungan	Sampah & sanitasi; belum ada pengaturan daya dukung	Program zero waste bertahap; peningkatan sanitasi; uji cepat daya dukung dan manajemen alur kunjungan	Penurunan sampah residu; fasilitas dasar membaik; kepadatan terkendali

Sumber Data: Hasil analisis peneliti, 2025.

Berangkat dari tabel pemetaan, **prioritas pertama** adalah penguatan tata kelola. Tanpa kelembagaan pengelola dan indikator yang dipantau rutin, strategi lain akan berjalan parsial. Rasoolimanesh et al. (2020) menunjukkan bahwa indikator keberlanjutan sering kehilangan dimensi governance; karena itu Banggai perlu memastikan indikator yang disepakati memasukkan aspek koordinasi, transparansi pendanaan pengelolaan, serta mekanisme pengaduan.

Prioritas kedua adalah pemberdayaan ekonomi lokal berbasis komunitas. CBT tidak otomatis terjadi hanya dengan membentuk kelompok; CBT perlu diikat melalui aturan main (bagi hasil, peran, standar layanan), serta dukungan pemasaran. Temuan Abreu et al. (2024) memperlihatkan bahwa CBT dapat berkontribusi pada beberapa tujuan SDGs bila komunitas berperan sebagai pengambil keputusan dan pengelola manfaat. Penguatan CBT di Banggai dapat diarahkan pada produk yang paling realistis: pemandu lokal, paket wisata singkat terpadu (air terjun–kuliner–produk UMKM), serta homestay dengan standar kebersihan yang jelas.

Prioritas ketiga adalah penguatan lingkungan melalui zero waste dan pengaturan daya dukung. Pengelolaan sampah bukan sekadar infrastruktur, tetapi perubahan perilaku dan konsistensi pengawasan. Pelajaran dari studi destinasi kecil menunjukkan perlunya kombinasi: pelatihan pengelola, edukasi pengunjung, kebijakan internal, dan kemitraan (Alim et al., 2024). Di sisi lain, daya dukung perlu diuji secara sederhana lebih dulu (misalnya: kapasitas parkir, kapasitas jalur, titik rawan kepadatan), lalu ditingkatkan ke pengukuran yang lebih rinci termasuk daya dukung sosial (Ismail & Widhi, 2022).

Terakhir, untuk destinasi bahari, strategi perlu mengikat pariwisata dengan konservasi. Integrasi pengaturan kawasan, pengawasan aktivitas wisata, dan pelibatan komunitas nelayan menjadi penting agar wisata bahari tidak merusak sumber daya yang justru menjadi daya tarik utama (Tranter et al., 2022). Secara operasional, langkah awal yang realistis adalah zonasi aktivitas (berenang, snorkeling, area sensitif), penetapan aturan pemandu, dan edukasi perilaku ramah ekosistem.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Banggai sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola destinasi sebagai variabel pengungkit utama yang memengaruhi pemerataan manfaat sosial-ekonomi, perlindungan budaya, dan pengendalian dampak lingkungan. Temuan mengindikasikan bahwa potensi wisata alam Banggai kuat dan memiliki peluang meningkatkan nilai ekonomi tanpa harus menaikkan volume kunjungan secara agresif, tetapi masih terdapat hambatan pada koordinasi lintas sektor, ketiadaan sistem monitoring indikator, serta pengelolaan sampah–sanitasi dan pengaturan daya dukung. Strategi prioritas yang paling relevan adalah membangun organisasi pengelola destinasi yang berfungsi sebagai simpul koordinasi dan pengendali indikator, memperkuat model pariwisata berbasis komunitas agar manfaat lebih merata dan pengalaman lebih otentik, serta menerapkan program zero waste dan manajemen daya dukung secara bertahap untuk menjaga kualitas lingkungan dan kenyamanan sosial destinasi.

Bibliografi

Abreu, L. A. d., Walkowski, M. d. C., Perinotto, A. R. C., & Fonseca, J. F. d. (2024). Community-Based Tourism and Best Practices with the Sustainable Development Goals. *Administrative Sciences*, 14(2), 36. <https://doi.org/10.3390/admsci14020036>

- Alim, A. K., Hadian, M. S. D., Novianti, E., Noor, A. A., & Yuliawati, A. K. (2024). Towards a Small Sustainable Tourism Destination Through Zero Waste: Evidence and Development Strategy of Udjo Ecoland, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(9). <https://doi.org/10.18280/ijstdp.190932>
- Anele, K. K. (2021). Assessing the impact of COVID-19 on the Indonesian tourism industry. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, 4(2), 107–120. <https://doi.org/10.17509/jithor.v4i2.34393>
- Ismail, Y., & Widhi, T. (2022). Study of social carrying capacity in the development of Tanjung Lesung as a sustainable tourist destination. *Journal of Community Development in Asia*, 5(2), 24–31. <https://doi.org/10.32535/jcda.v5i2.1493>
- Rasoolimanesh, S. M., Ramakrishna, S., Hall, C. M., Esfandiar, K., & Seyfi, S. (2020). A systematic scoping review of sustainable tourism indicators in relation to the sustainable development goals. *Journal of Sustainable Tourism*. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1775621>
- Risfandini, A. (2024). Sustainable tourism implementation in Indonesia: Emphasizing green tourism, community-based tourism, and local empowerment. *Barista: Jurnal Kajian Bahasa dan Pariwisata*, 11(1), 58–67.
- Tranter, K., et al. (2022). Integrated marine protected areas can address sustainability of nature-based tourism, fisheries and marine conservation. *Marine Policy*, 146, 105301. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105301>.
- Zakaria, J. (2024). Sustainable tourism as an economic development model in evaluation and prospects of priority tourism destination development policy in Indonesia. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 8(2). <https://doi.org/10.24198/jmpp.v8i2.54183>.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.
- Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. (2021). OW Alam Salodik (DTW Kabupaten Banggai).